

**PELANGGARAN KEDAULATAN DI WILAYAH UDARA NEGARA
INDONESIA OLEH PESAWAT SIPIL ASING**

JURNAL ILMIAH

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

DITA ANGGRAINI WIBOWO

NIM. 105010100111006



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

PELANGGARAN KEDAULATAN DI WILAYAH UDARA NEGARA INDONESIA OLEH PESAWAT SIPIL ASING

Dita Anggraini Wibowo, Nurdin, SH.Mhum, Heru Prijanto, SH.MH.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

105010100111006@ub.ac.id

Abstrak

Negara yang berdaulat diartikan sebagai negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi (*supreme authority*) yang berarti bebas dari kekuasaan negara lain. Wilayah kedaulatan negara mencakup pula ruang udara di atas wilayahnya. Kedaulatan suatu negara di ruang udara di atas wilayah teritorialnya bersifat utuh dan penuh. Pelanggaran wilayah udara adalah suatu keadaan, di mana pesawat terbang suatu negara sipil atau militer memasuki wilayah udara negara lain tanpa izin sebelumnya dari negara yang dimasukinya. Masalah yang ada dalam kedaulatan negara di ruang udara adalah pelanggaran batas yang sering dilakukan oleh pesawat militer atau pesawat sipil dari negara lain. Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah hukum udara internasional yang ada sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia dan bagaimanakah penegakan hukum yang ada di dunia internasional dan di Indonesia sendiri. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, Hukum yang ada di Indonesia mempunyai beberapa persamaan dengan hukum internasional karena hukum udara nasional diadaptasi dari hukum udara internasional. Berdasarkan hukum udara nasional Indonesia memberikan pemberitahuan dan peringatan, pemaksaan pendaratan pada pesawat militer atau pesawat sipil asing tersebut, pengusiran dari zona larangan terbang, melakukan penyidikan serta menjatuhkan sanksi kepada pelaku pelanggar maupun negara pelanggar apabila tindakan pelanggaran tersebut dianggap membahayakan keamanan dan pertahanan kedaulatan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata Kunci : Kedaulatan, Pelanggaran, Pesawat Sipil Asing

VIOLATION OF SOVEREIGNTY IN THE AIR INDONESIA BY FOREIGN CIVIL AIRCRAFT

Dita Anggraini Wibowo, Nurdin, SH.Mhum, Heru Prijanto, SH.MH.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

105010100111006@ub.ac.id

Abstrac

Sovereign state is defined as a country that has the highest power (supreme authority) which means free from the power of another country. Region of state sovereignty extends to the air space above its territory. A country's sovereignty in the air space above its territory is intact and full. Airspace violations is a state, where a state of civil aircraft or military airspace entering another country without prior permission of the state into. Problems that exist in the state sovereignty in the air space is a boundary violation that is often performed by military aircraft or civilian aircraft from other countries. Therefore this study was conducted to analyze whether the existing international air law in accordance with the existing law in Indonesia and how enforcement of existing laws internationally and in Indonesia itself. This study was conducted with the literature study using the approach of legislation and case approach. Based on the research results, the existing law in Indonesia has some similarities with international law because national air law adapted from the international air law. Based on Indonesian national air law provide notifications and alerts, forced landing on a military aircraft or foreign civil aircraft, the expulsion of a no-fly zone, conduct investigations and impose sanctions on violators and offenders country if such conduct deemed harmful to the security and defense of the sovereignty of the territory of the Unitary Republic of Indonesia.

Keywords: Sovereignty, Violation, Foreign Civil Aircraft

I. PENDAHULUAN

Kedaulatan negara merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dijaga oleh suatu negara. Negara yang berdaulat diartikan sebagai negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi (*supreme authority*) yang berarti bebas dari kekuasaan negara lain, bebas dalam arti seluas – luasnya baik ke dalam maupun ke luar.

Wilayah kedaulatan negara mencakup pula ruang udara di atas wilayahnya. Ditegaskan dalam pasal 1 Konvensi Chicago 1944 yang berbunyi “*The Contracting States recognize that every State has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory*” (Pengakuan atas kedaulatan negara yang mutlak dan penuh tersebut berlaku bagi seluruh negara, meskipun negara yang bersangkutan bukan anggota konvensi).

Kedaulatan menurut hukum nasional Indonesia adalah: “wewenang tertinggi berdasarkan kemerdekaan bangsa, kemerdekaan mandala, kemerdekaan pemerintahan dengan kemerdekaan melaksanakan tujuan negara, serta berkebebasan penuh melaksanakan pemerintahan dalam negeri dan mengendalikan kebijakan luar negeri”.

Kedaulatan yang dimiliki oleh negara terkandung hal-hal yang berhubungan dengan kedaulatan dan tanggung jawab negara terhadap wilayahnya, sebagai negara yang berdaulat Indonesia dapat mengatur wilayah darat, laut maupun udara untuk kepentingan pertahanan, keamanan, keselamatan penerbangan, maupun kegiatan sosial lainnya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara pantai (*coastal state*) yang komponen wilayah nasionalnya terdiri atas daratan, lautan, (perairan) dan ruang udara (*air space*). Batas wilayah udara terbagi menjadi dua yaitu batas wilayah udara secara horizontal dan batas wilayah udara secara vertikal. Kedaulatan Republik Indonesia secara vertikal tergantung pada kemampuan Indonesia mempertahankan kedaulatan di udara.

Setiap negara mempunyai standar penjagaan ruang udara wilayahnya secara ketat. Ruang udara nasional suatu negara sepenuhnya tertutup bagi pesawat udara asing baik sipil maupun militer dan hanya dengan izin dari negara kolong terlebih dahulu baik melalui perjanjian bilateral maupun multilateral, maka ruang udara nasional dapat dimasuki atau dilalui pesawat udara asing.

Pelanggaran wilayah udara adalah suatu keadaan, di mana pesawat terbang suatu negara sipil atau militer memasuki wilayah udara negara lain tanpa izin sebelumnya dari negara yang dimasukinya. Dilihat dari beberapa kasus pelanggaran lintas batas yang ada di Indonesia bersifat biasa dan tidak begitu mengancam, namun negara Indonesia harus bertindak tegas karena kedaulatan negaranya dilanggar oleh negara lain karena pada kenyataannya di lapangan banyak terjadi pelanggaran daerah perbatasan udara kita oleh negara asing baik dari pesawat sipil maupun pesawat militer.

Bentuk penegakan kedaulatan atas wilayah ruang udara nasional, antara lain penegakan hukum terhadap pelanggaran wilayah udara kedaulatan Indonesia dan pelanggaran terhadap kawasan udara terlarang, baik kawasan udara nasional maupun asing, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, dan Peraturan Pemerintah RI No. 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan.

Standar penjagaan ruang udara di Indonesia masih dianggap kurang karena beberapa faktor seperti kurangnya teknologi yang dimiliki Indonesia, Lemahnya sistem radar di Indonesia serta minimnya jumlah pesawat dan alutsista membuat pengawasan wilayah udara Indonesia menjadi tidak maksimal

Dari permasalahan tersebut maka penulis mengambil judul **PELANGGARAN KEDAULATAN DI WILAYAH UDARA NEGARA INDONESIA OLEH PESAWAT SIPIL ASING** sebagai penelitian penulisan skripsi.

II. PERMASALAHAN

1. Bagaimana hukum Internasional mengatur pelanggaran kedaulatan di wilayah udara?
2. Bagaimana penerapan hukum udara nasional terhadap pelanggaran kedaulatan di wilayah udara Indonesia oleh pesawat sipil asing?
3. Apa saja hambatan-hambatan dan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran kedaulatan di wilayah udara Indonesia oleh pesawat sipil asing?

III. PEMBAHASAN

Penegakan kedaulatan negara di udara, khususnya di dalam menghadapi pelanggaran wilayah udaranya oleh pesawat sipil asing telah mengalamiperkayaan asas norma hukum yang menuju pada pembatasan tindakan korektif.

Dalam lalu lintas udara internasional sering pula terjadi pelanggaran kedaulatan udara suatu negara oleh pesawat-pesawat sipil maupun militer. Dalam hal ini negara yang kedaulatan udaranya dilanggar dapat menyergap pesawat asing tersebut dan diminta untuk mendarat

Pelanggaran wilayah udara nasional oleh pesawat udara asing sipil, terlebih lagi oleh pesawat udara militer asing, sering kali ditindak secara kaku dengan kekerasan senjata.

Peristiwa penembakan pesawat sipil tersebut menampilkan dua fakta kejadian yaitu adanya kejadian pelanggaran wilayah udara oleh pesawat sipil dan adanya penembakan terhadap pesawat sipil itu oleh negara yang wilayahnya dilanggar.

Sepanjang menyangkut pesawat sipil, negara yang kedaulatannya telah dilanggar tidak dapat menggunakan tindakan balasan tanpa batas. Tindakan yang diambil harus bersikap bijaksana dan tidak membahayakan nyawa para penumpang yang ada dalam pesawat.

Asas pertimbangan kemanusiaan yang mendasar (*elementary considerations of humanity*) secara tegas telah dinyatakan sebagai asas yang

selalu harus melandasi tindakan negara-negara dalam menghadapi pelanggaran wilayah udaranya oleh pesawat sipil asing.¹

Hukum Internasional yang mengatur pelanggaran kedaulatan di wilayah udara

Dalam konteks masyarakat internasional terdapat pengakuan bahwa setiap negara mempunyai hak eksklusif dalam batas wilayah negaranya tanpa ada keterikatan atau pembatasan dari hukum internasional. Di dalam Hukum udara internasional pelanggaran batas wilayah kedaulatan di ruang udara diatur dalam Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944.

Dengan adanya perkembangan masyarakat internasional serta hukum internasional dan hukum udara internasional itu sendiri, maka kedaulatan negara atas ruang udara di atas wilayahnya itu tidak lagi bersifat penuh dan mutlak.²

Dalam hal pelanggaran kedaulatan udara suatu negara yang terjadi karena suatu hal maka guna melindungi pesawat udara sipil dari kekerasan senjata dari negara yang merasa dilanggar yang sering berakibat fatal bagi keselamatan penumpang dan awak pesawat maka Konvensi Chicago 1944 (*Convention on International Civil Aviation*) diubah oleh *Protocol relating to an amendment to the Convention on International Civil Aviation* yang ditandatangani pada tanggal 10 Mei 1984 di Montreal.

Bagian yang ditambahkan dalam Konvensi Chicago 1944 adalah *pasal 3 bis* yang mempunyai pokok uraian³ :

- 1) Negara mempunyai kewajiban hukum untuk tidak menggunakan senjata terhadap pesawat udara sipil dalam penerbangannya dan di dalam hal melakukan prosedur pencegahan (*interception*), negara berkewajiban

¹ Yasidi Hambali, Hukum dan Politik Kedirgantaraan, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hlm 20

² Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 169

³ Yasidi Hambali, *op.cit.* hlm 34-35

untuk tidak membahayakan jiwa manusia yang berada dalam pesawat, serta pesawat yang diintersepsi itu sendiri.

- 2) Ditetapkan bahwa sebagai perwujudan kedaulatan, negara berhak memerintahkan pesawat udara sipil yang melakukan pelanggaran wilayah udara mendarat di pelabuhan udara negara itu yang ditentukan, dalam menerapkan kewenangannya, kembali diingatkan agar negara memperhatikan ketentuan yang pertama di atas. Selain itu negara diminta untuk mengumumkan ketentuan-ketentuan yang dibuatnya dalam mengatur prosedur intersepsi terhadap pesawat udara sipil.
- 3) Setiap pesawat udara sipil harus mematuhi instruksi yang diberikan oleh negara yang melakukan intersepsi terhadapnya. Untuk mendukung prinsip pematuhan ini setiap negara dituntut untuk memasukkan dalam perundang-undangan nasionalnya ketentuan bahwa pesawat udara sipil yang terdaftar di negaranya, akan mematuhi instruksi negara yang melakukan intersepsi kapan saja pesawat udara sipil itu mengalami kasus sedemikian. Juga dituntut agar setiap negara menetapkan dalam perundang-undangan nasionalnya ketentuan hukuman yang berat bagi para pemilik atau operator pesawat sipil yang terdaftar di negaranya, yang melanggar prinsip pematuhan dalam menghadapi intersepsi oleh negara lain
- 4) Setiap negara akan mengalami tindakan-tindakan agar pesawat udara sipil yang terdaftar di negaranya, tidak dipergunakan untuk maksud yang bertentangan dengan tujuan Konvensi Chicago.

Walaupun tidak semua negara menjadi pihak atau peserta dari kedua konvensi tersebut, namun adanya pengakuan atas kedaulatan negara pada ruang udara di wilayahnya serta praktek negara-negara yang menghormati isi dari kedua konvensi tersebut dapat disimpulkan bahwa kedaulatan setiap negara atas ruang udara di wilayah (daratan maupun perairan), sudah merupakan hukum kebiasaan internasional.

Penerapan Hukum Udara Nasional di Indonesia terhadap pelanggaran kedaulatan di wilayah udara Indonesia oleh pesawat sipil asing

Negara Indonesia telah menjadi anggota Organisasi Penerbangan Sipil Internasional sejak 27 April 1950 dan telah menyempurnakan undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 yang mengacu kepada Konvensi Chicago 1944.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, pada Bab III Kedaulatan Atas Wilayah Udara pada Pasal 4 menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia berdaulat penuh dan utuh atas wilayah udara Republik Indonesia yang artinya sebagai negara berdaulat, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kedaulatan penuh dan utuh di wilayah udara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional.

Selanjutnya pada Pasal 5 menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara Republik Indonesia, Pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, penerbangan dan ekonomi nasional.

Untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia, pada awalnya negara Indonesia menggunakan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 menetapkan zona larangan terbang yang dianggap atas dasar pertimbangan pertahanan keamanan dan keselamatan penerbangan.

Namun disesuaikan dengan perkembangan hukum udara internasional dan perkembangan yang ada di Indonesia maka peraturan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 pasal 6 yaitu dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara, Indonesia melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara, sosial budayam serta lingkungan udara, karena itu pemerintah menetapkan zona larangan atau pembatasan terbang.

Beberapa contoh kasus diatas apabila terdapat pesawat udara sipil asing yang melanggar wilayah udara atau zona larangan terbang di Indonesia maka :

- 1) Personel lalu lintas udara memberikan peringatan agar pesawat udara tersebut meninggalkan zona larangan atau pembatasan terbang.
- 2) Personel lalu lintas udara juga menginformasikan adanya pesawat udara yang melanggar zona larangan maupun pembatasan terbang kepada aparat yang bertugas di bidang pertahanan negara.
- 3) Apabila peringatan yang diberikan tidak ditaati maka dilakukan tindakan pemaksaan oleh pesawat udara negara (*state aircraft*) untuk keluar wilayah Indonesia atau pembatasan terbang untuk mendarat di pangkalan udara atau bandar udara terdekat.
- 4) Semua awak pesawat udara beserta muatannya diperiksa dan disidik dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Semua prosedur diatas merupakan peraturan yang berdasarkan pada undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan pada pasal 8. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran wilayah kedaulatan, penetapan kawasan udara terlarang, kawasan udara terbatas, pelaksanaan tindakan terhadap pesawat udara dan personel pesawat udara, serta tata cara dan prosedur pelaksanaan tindakan pemaksaan oleh pesawat udara negara diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Hambatan dan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran kedaulatan di wilayah udara Indonesia oleh pesawat sipil asing

Masalah pengawasan dan keamanan lalu lintas udara dan pengamanan atas pesawat-pesawat udara merupakan aspek sangat penting dalam pengaturan hukum yang dibuat oleh suatu negara. Negara – negara di dunia internasional sering membuat kesepakatan-kesepakatan bilateral atau regional dibidang kerjasama pengawasan ataupun keamanan dalam lalu lintas udara internasional.

Pelanggaran wilayah udara (*aerial intrusion*) keadaan dimana pesawat terbang asing yang memasuki wilayah udara nasional tanpa ijin. Masuknya pesawat udara asing ke wilayah udara nasional tanpa ijin ada yang disengaja misalnya penerbangan gelap (*black flight*) untuk maksud-maksud tertentu dan ada pula yang tidak disengaja misalnya tersesat (*aircraft in distress*).

Penegakkan hukum adalah suatu upaya dari mempertahankan kedaulatan negara, Indonesia sebagai negara yang berdaulat menetapkan seperangkat aturan hukum untuk mengatur, mengendalikan dan menegakkan hukum di wilayah udara yang berada di bawah yurisdiksi Indonesia. Penegakan hukum terhadap pelanggaran wilayah udara dan atau kawasan udara terlarang sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia.⁴

Sesuai dengan pasal 10 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, Angkatan Udara bertugas antara lain ; melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan; menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara Yuridiksi Nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi; melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara, dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara.

Untuk mengimplementasikan pelaksanaan tugas penegakan kedaulatan dan hukum di ruang udara nasional tersebut, maka dibutuhkan peran Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas). Karena Kohanudnas memiliki kemampuan deteksi, identifikasi dan penindakan terhadap seluruh wahana udara yang melakukan pelanggaran terhadap wilayah udara Republik Indonesia. Sementara itu, dalam melaksanakan tugas tersebut, Kohanudnas melaksanakan Operasi Pertahanan Udara, baik aktif maupun pasif.

⁴ Puspen TNI, 2006, Penegakan Kedaulatan dan Hukum di Ruang Udara Nasional (online), <http://www.tni.mil.id/view-3001-penegakan-kedaulatan-dan-hukum-di-ruang-udara-nasional.html>, (07 September 2014)

Hakekat Operasi Pertahanan Udara adalah merupakan kegiatan sebagai upaya mempertahankan kedaulatan wilayah nasional terhadap setiap ancaman yang menggunakan media udara.

Upaya pertahanan tersebut dilakukan secara terpadu dengan melibatkan unsur TNI maupun Sipil yang berkemampuan pertahanan udara dengan asas-asas operasi pertahanan yang memiliki sasaran keunggulan udara dan tegaknya hukum di wilayah udara nasional.

Selain itu Negara Indonesia juga berupaya memperbaharui serta melengkapi alutsista dibidang pertahanan udara, seperti memperbaharui pesawat-pesawat milik Tentara Nasional Indonesia (TNI AU), memperbaharui radar-radar yang ada guna mendeteksi kedatangan pesawat-pesawat asing yang melanggar wilayah udara Indonesia.

Upaya – upaya lain yang dilakukan oleh negara Indonesia dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kedaulatan di wilayah udara Indonesia oleh pesawat sipil asing adalah membentuk *Air Defence Identification Zone* (ADIZ) dan *Restricted* dan *Prohibited Area* (daerah terbatas dan terlarang), dengan mempertimbangkan sistem dan kemampuan unsur-unsur pertahanan udara.

ADIZ adalah suatu ruang udara tertentu yang didalamnya pesawat harus memberikan identifikasi sebelum memasuki wilayah yang dimaksud. Dasar hukum pendirian ADIZ adalah praktek internasional yang telah menjadi kebiasaan internasional (*customary international law*).⁵

Dalam upaya mewujudkan keseimbangan antara kepentingan kesejahteraan nasional dengan pertahanan negara di wilayah kedaulatan ruang udara, upaya yang dilakukan adalah membangun, membina dan memperkuat sumber daya dan kekuatan tangkal yang mampu meniadakan setiap ancaman dan atau pelanggaran hukum di ruang udara baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri.

⁵ Markas Besar TNI AU, 2000, Buku Panduan Perwira Hukum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, Jakarta, hlm. 8.

Hambatan dalam Penegakkan Hukum terhadap Pelanggaran Kedaulatan di wilayah udara Indonesia oleh pesawat Sipil Asing adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai operator pengatur lalu lintas ruang udara menjadi salah satu kunci utama pengelolaan wilayah udara nasional. Keterbatasan kemampuan SDM di bidang teknologi yang dimiliki operator Indonesia dan dukungan alat peralatan navigasi maupun radar pengatur lalu lintas ruang udara telah mempengaruhi kemampuan negara Indonesia mengelola wilayah udara nasional.

Penetapan ADIZ suatu negara didasarkan pada dua hal yang menjadi dasar yaitu : pertama, mengikuti perkembangan dunia dimana teknologi penerbangan sudah semakin maju. Kedua, Penetapan ADIZ bukan semata-mata untuk kepentingan pengaturan lintas udara ataupun mencari keuntungan dalam pengaturannya, akan tetapi untuk kepentingan pertahanan dari Negara tersebut. Penetapan ADIZ Indonesia yang diikuti dengan penegakan ADIZ bagi pesawat yang tidak melakukan identifikasi dilakukan dengan cara tegas, oleh karena itu ADIZ Indonesia harus didukung oleh Alutsista yang memadai. Dibandingkan dengan luas wilayah udara yang harus dipertahankan maka Alutsista TNI AU belum mencukupi.⁶

IV. PENUTUP

Berdasarkan hukum yang ada di Indonesia, negara Indonesia telah mengadaptasi dan mengacu kepada hukum udara internasional, hal ini dibuktikan dengan undang-undang di Indonesia yang memakai prinsi dari Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944.

Di dalam Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944 terdapat daerah zona larangan terbang dimana negara kolong berhak melarang pesawat baik pesawat asing sipil maupun pesawat militer untuk melalui ruang udara di wilayahnya.

⁶ Mirtusin, Kajian Penerapan ADIZ Indonesia guna menegakkan Hukum dan Kedaulatan di WILAYAH Udara dalam Rangka Menjamin Keutuhan Wilayah Kesatuan Republik Indonesia, Lembang, 2012

Negara Indonesia menetapkan zona larangan terbang dan sebagai negara yang berdaulat Indonesia berhak menindak segala sesuatu pelanggaran yang berada di wilayah yurisdiksinya.

Terhadap pelanggaran wilayah udara Republik Indonesia dan atau kawasan udara terlarang oleh pesawat udara sipil, dilaksanakan penegakan hukum yang harus menjamin keselamatan dan keamanan awak pesawat, penumpang dan pesawat udara.

Apabila terjadi pelanggaran maka personel lalu lintas memberikan peringatan kepada pesawat agar pesawat meninggalkan zona larangan terbang tersebut, Personel lalu lintas udara juga menginformasikan adanya pesawat udara yang melanggar zona larangan terbang kepada aparat yang bertugas di bidang pertahanan negara.

Pemerintah Indonesia memberikan tanggung jawab pengamanan negara di bidang udara kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI AU) yang juga berhak melakukan penegakan hukum terhadap pelanggar kedaulatan wilayah udara di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Pramono, **Dasar-Dasar Hukum Udara dan Ruang Angkasa**, Ghalia Indonesia, Bogor 2011
- Amad Sudiro, **Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik (*Public International and National Air Law*)**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- E. Suherman, **Hukum Udara Indonesia dan Internasional**, Alumni, Jakarta, 1979
- Etty R. Agoes, **Peran Hukum Dalam Pembangunan di Indonesia**, PT Remaja Rosda Karya, Bandung 2013
- I Wayan Parthiana, **Pengantar Hukum Internasional**, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Mahendra Putra Kurnia, **Hukum Kewilayahan Indonesia: Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI Berbasis Teknologi Geospasial**, Universitas Brawijaya Press (UB Press), Malang, 2011
- Martono, **Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik (*Public International and National Air Law*)**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Mochtar Kusumaatmadja, **Pengantar Hukum Internasional**, Binacipta, Jakarta, 1982
- Priyatna Abdurrasyid, **Kedaulatan Negara di Ruang Udara (*State Sovereignty in Airspace*)**, Pusat Penelitian Hukum Angkasa, 1992
- T. May Rudy, **Hukum Internasional II**, PT Refika Aditama, Bandung, 2006
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat**, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2009.

Yasidi Hambali, **Hukum dan Politik Kedirgantaraan**, Pradnya Paramita,
Jakarta, 1994

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KONVENSI

Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation, signed at Paris on 13
Oktober 1919.

Convention on International Civil Aviation, Signed at Chicago on 7 December
1944. Konvensi Montevideo Tahun 1933

United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)

Peraturan Presiden RI No 5 tahun 2005 tentang Pengesahan Chicago Convention

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1985 Ratifikasi UNCLOS

Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang – Undang Nomor 83 Tahun 1958 tentang Penerbangan

Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

JURNAL DAN LAPORAN

Mirtusin, **Kajian Penerapan ADIZ Indonesia guna menegakkan Hukum dan Kedaulatan di WILAYAH Udara dalam Rangka Menjamin Keutuhan Wilayah Kesatuan Republik Indonesia**, Lembang, 2012

INTERNET

Anonim, **AS Terbukti Langgar Kedaulatan Udara RI**,
<http://www.suaramerdeka.com/harian/0307/09/nas15.htm> (9 Juli 2003)

S.M Noor, **Ruang Udara**, 2012, <http://www.negarahukum.com/hukum/ruang-udara.html> (6 September 2014)

faj., **9 Penembakan Pesawat Komersial (1)**,
<http://international.okezone.com/read/2014/07/25/411/1018086/9-insiden-penembakan-pesawat-komersial-1>, (31 Juli 2014), 2014

Heru Andriyanto., **Ini sejumlah Insiden Penembakan Pesawat Sipil** (online),
<http://www.beritasatu.com/asia/197584-ini-sejumlah-insiden-penembakan-pesawat-sipil.html>, (18 Juli 2014), 2014

<http://lintasdetik.com/2014/04/11/pesawat-asing-bobol-pertahanan-udara-ri>,

Pesawat Asing Bobol Pertahanan Udara RI, Jumat, 11 April 2014
<http://angkasasena.blogspot.com/2008/05/procedure-interception-of-civil.html>

Meidela Syahni., **Kronologi Jatuhnya Pesawat Malaysia Airlines #MH17 di Ukraina**,
<http://internasional.kompas.com/read/2014/07/18/11141031/Kronologi.Jatuhnya.pesawat.Malaysia.Airlines.MH17.di.Ukraina>, (2 September 2014), 2014

Sumber : Merdeka, 2013, **5 Aksi TNI AU usir pesawat asing**,

<http://pertahananbangsa.blogspot.com/2013/05/5-aksi-tni-au-usir-pesawat-asing-di.html>, diakses 7 September 2014

Sumber : Jawa Pos, Dua **F16 TNI-AU Sergap Pesawat Swiss**,

<http://www.jawapos.com/baca/artikel/9/Dua-F16-TNI-AU-Sergap-Pesawat-Swiss>, 2014, diakses 7 September 2014